

Judul : 60 ribu calon mahasiswa tidak daftar ulang, kenapa ya?
Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

60 Ribu Calon Mahasiswa Tidak Daftar Ulang, Kenapa Ya?

Dunia pendidikan digegerkan dengan fenomena 60 ribu calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi tidak melakukan daftar ulang.

Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) memberikan klarifikasi bahwa angka tersebut bukan berasal dari satu jalur seleksi saja.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Prof. Eduard Wolok menjelaskan, angka 60 ribu tersebut merupakan total kuota yang tidak terisi dari seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru di PTN, yakni

Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), serta jalur mandiri yang diselenggarakan masing-masing perguruan tinggi.

"Jadi perlu diluruskan, 60 ribu siswa yang tidak daftar ulang itu bukan dari satu jalur. Itu sebenarnya total kuota yang tidak terisi dari seluruh jalur," ujar Eduard Wolok dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Meski demikian, fenomena tersebut

tetap menjadi perhatian berbagai pihak. Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta Pemerintah menjadikan persoalan ini sebagai momentum untuk mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri.

"Informasi mengenai peserta yang tidak melakukan registrasi ulang masuk perguruan tinggi negeri perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi bagaimana negara mendefinisikan keberhasilan sistem pendidikan tinggi," kata Puan.

Menurutnya, keberhasilan sistem penerimaan mahasiswa baru tidak cu-

kup hanya diukur dari jumlah peserta yang dinyatakan lolos seleksi, tetapi juga dari sejauh mana peserta yang telah memperoleh kursi benar-benar dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Puan juga menilai, Pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap berbagai faktor yang menyebabkan calon mahasiswa tidak melanjutkan proses registrasi, mulai dari ketidaksesuaian pilihan program studi hingga kendala pembiayaan.

Sementara itu, Kepala Bidang Litbang Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Feriansyah menilai, salah

satu penyebab banyaknya calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang adalah persoalan biaya pendidikan, khususnya besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Senada dengan itu, Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarif Muhammad menegaskan, kebijakan UKT harus dievaluasi agar penetapannya benar-benar mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa.

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Habib Syarif Muhammad dan Feriansyah mengenai fenomena tersebut, berikut petikan wawancara.

FERIANSYAH, Kabid Litbang P2G

Faktor Ekonomi Cukup Berpengaruh



“Ini menjadi fenomena yang harus dicermati, karena biaya pendidikan tinggi masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga.”

Bagaimana komentar Anda terkait fenomena sekitar 60.000 siswa yang lolos jalur seleksi prestasi, tetapi tidak melakukan daftar ulang?

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada persoalan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru. Salah satunya adalah adanya siswa yang mendaftar melalui jalur prestasi hanya sebagai cadangan.

Meski tetap mengikuti seleksi lain, misalnya sekolah kedinasan atau jalur seleksi berbeda yang dianggap lebih sesuai dengan tujuan mereka. Ketika diterima di pilihan yang lebih diinginkan, mereka akhirnya tidak melakukan daftar ulang di perguruan tinggi yang menerima mereka melalui jalur prestasi.

Apakah ini berarti sistem penerimaan mahasiswa baru perlu dievaluasi? Ya, saya kira perlu ada evaluasi menyeluruh. Selama ini sistem penerimaan di berbagai perguruan tinggi dan kementerian masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga belum terintegrasi.

Akibatnya, banyak siswa yang memanfaatkan beberapa jalur sekaligus sebagai alternatif. Kondisi ini menyebabkan kursi yang sudah dialokasikan melalui jalur prestasi akhirnya kosong.

Selain faktor sistem, apa lagi yang menyebabkan siswa tidak melakukan daftar ulang?

Faktor ekonomi juga cukup berpengaruh. Ada siswa yang berprestasi, tetapi setelah mengetahui besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau bahkan uang pangkal di beberapa perguruan tinggi, mereka akhirnya mengundurkan diri karena merasa tidak mampu membayar. Ini menjadi fenomena yang harus dicermati karena biaya pendidikan tinggi masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga.

Lalu, apa solusi agar kursi yang kosong akibat tidak daftar ulang tidak terbuang sia-sia?

Ke depan, kita membutuhkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang lebih terintegrasi antarperguruan tinggi dan kementerian, dukungan pembiayaan pendidikan yang lebih tepat sasaran, transparansi dalam penetapan UKT, serta penguatan layanan konseling karier di sekolah. Dengan demikian, siswa dapat memilih program studi yang benar-benar sesuai dengan minat dan kemampuannya, sementara perguruan tinggi juga dapat meminimalkan kursi kosong akibat tidak adanya daftar ulang. ■ REN

HABIB SYARIEF MUHAMMAD, Anggota Komisi X DPR RI

Evaluasi Harus Secara Serius & Menyeluruh



“Kita harus membedakan terlebih dahulu antara UKT dan uang pangkal atau sumbangan pengembangan institusi.”

Banyaknya sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang disebut salah satunya karena besaran UKT. Bagaimana tanggapan Anda?

Kita harus membedakan terlebih dahulu antara UKT dan uang pangkal atau sumbangan pengembangan institusi. UKT adalah Uang Kuliah Tunggal, sedangkan yang sering dikaitkan dengan uang bangunan merupakan komponen yang berbeda.

Prinsipnya, UKT memang harus benar-benar menjadi uang kuliah tunggal. Dalam ketentuan yang ada, besaran UKT seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa. Ada pembagian kelompok atau klaster, sehingga tidak bisa disamaratakan.

Kalau berasal dari keluarga mampu, tentu tidak menjadi persoalan apabila dikenakan UKT yang lebih tinggi. Namun, bagi keluarga dengan

kemampuan ekonomi terbatas, jangan dipraktekkan sama. Itu tidak adil.

Artinya, kebijakan UKT ini harus dievaluasi?

Bukan sekadar perlu dievaluasi, tetapi memang harus dievaluasi. Harus ada kebijakan yang benar-benar jelas mengenai UKT. Nantinya saja Uang Kuliah Tunggal, maka penerapannya harus konsisten, namun tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa melalui mekanisme yang adil.

Kalau UKT dipukul rata tanpa melihat kemampuan ekonomi keluarga, itu jelas tidak adil.

Bagaimana dengan uang pangkal atau uang bangunan yang juga menjadi sorotan?

Kalau uang pangkal memang dipersilakan, tetapi jangan sampai praktiknya menimbulkan ketidakadilan. Saya pernah menyampaikan

soal adanya nominal sumbangan di beberapa perguruan tinggi ternama. Memang secara aturan sifatnya sukarela. Namun, saya mendapat banyak masukan dari masyarakat soal uang bangunan ini.

Jadi, menurut Anda evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh? Betul. Evaluasi harus dilakukan secara serius dan menyeluruh. Saya mendengar Pemerintah sebenarnya sudah mulai mengambil langkah. Saat kami menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, telah disampaikan adanya sejumlah langkah perbaikan.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar sudah dijalankan hingga ke tingkat perguruan tinggi secara konsisten. Itu yang masih perlu kita pastikan bersama. ■ REN